

**RETRIBUSI-INDUSTRI
PERDA KABUPATEN GARUT NOMOR 13 TAHUN 2001
2001**

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN IZIN USAHA INDUSTRI DAN PERDAGANGAN

- Abstrak** : - Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah, perlu adanya usaha untuk meningkatkan pelayanan optimal dalam penyelesaian perizinan dibidang industri dan perdagangan. Oleh karena itu perlu ditetapkan peraturan daerah yang mengatur tentang retribusi pelayanan izin usaha industri dan perdagangan;
- Dasar hukum : UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 7 Tahun 1955; UU No. 19 Tahun 1960; UU No. 49 Prp Tahun 1960; UU No. 8 Tahun 1962; UU No. 11 Tahun 1965; UU No. 8 Tahun 1974; UU no. 8 Tahun 1981; UU No. 3 Tahun 1982; UU No. 5 Tahun 1984; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; PP No. 30 Tahun 1980; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 20 Tahun 1997; PP No. 25 Tahun 2000; Keppres RI No. 44 Tahun 1999; Perda Kabupaten Daerah Tingkat I Garut No. 1 Tahun 1986 dan Perda Kabupaten Garut No. 24 Tahun 2000; Perda Kabupaten Garut No. 25 Tahun 2000; Perda Kabupaten Garut No. 26 Tahun 2000; Perda Kabupaten Garut No. 27 Tahun 2000;
- Perda ini mengatur antara lain mengenai obyek dan subyek retribusi, golongan retribusi, struktur dan besarnya tarif, tata cara penagihan dan keetentuan pidana.
- Status** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dalam keputusan Bupati;
- Diundangkan pada tanggal 2 Juli 2001
- Catatan** : -